

**ANALISIS PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA DAERAH PEMEKARAN  
DI SUMATERA BARAT**

**ARTIKEL**



Oleh :  
**GIAN BENOVA**  
88771/2007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANALISIS PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA DAERAH PEMEKARAN  
DI SUMATERA BARAT**

Oleh :  
**GIAN BENOVA**  
88771/2007

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, September 2013

**Pembimbing I**



**Lili Anita S.E., MSi, Ak**  
NIP. 197105222000032001

**Pembimbing II**



**Nurzi Sabrina, S.E., M.Sc., Ak**  
NIP. 19720910 1998022 003

# **ANALISIS PERBEDAAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA DAERAH PEMEKARAN DI SUMATERA BARAT**

**Gian Benova**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang  
Email : gianbenova@ymail.com

## **Abstract**

This study aimed to examine: 1) Implementation Differences DPPKAD Pariaman SPIP by the District Damasraya. 2) Implementation Differences SPIP by DPPKAD Pariaman with South Solok. 3) Implementation Differences SPIP by DPPKAD South Solok regency Damasraya

This type of research that is classified in causal comparative research. Population in this research is in the area of financial management personnel County District Damasraya Damasraya which division dated December 18, 2003, Pariaman 10 April 2002, and South Solok December 18, 2003. The data used in this study of primary data. Data collection methods used are questionnaires to distribute to the office of financial and asset management areas (DPPKAD) became the third area of research object. The analysis used was a comparative analysis of One Way ANOVA with decisions based on the 0.05 to see the difference Implementation of Internal Control Systems in Local Government Redistricting in West Sumatra. Hypothesis testing results showed 1) There are differences between the SPIP Implementation local government financial management officials Pariaman with Dhamasraya District. This is demonstrated by the significant value of 0.000 is smaller than 0.05. Implementation differences SPIP local government financial management officials on fixed assets amounted to 15.174, 2) There is a difference between the SPIP Implementation local government financial management officials Pariaman with Solok. This is demonstrated by the significant value of 0.000 is smaller than 0.05. Implementation differences SPIP local government financial management officials on fixed assets of 43.58902, 3) There are differences between the apparatus SPIP implementation of financial management at the local government district of South Solok Dhamasraya. This is demonstrated by the significant value of 0.000 is smaller than 0.05. Implementation of accounting standard differences SPIP government officials at the local government financial managers -28.41471.

Based on these results, it is suggested to the government, 1) Therefore, the Government Accounting Standards is the basis of opinion by the CPC and an important guideline in the preparation and presentation of financial statements that the government should further improve the understanding of SAP so that differences in the perception of the financial statements can be avoided, 2) Should future research expanding area of research, so as to obtain many samples, 3) The use of questionnaires in addition to methods such as interview method can be used to obtain two-way communication with the subject and get answers to the subject of honesty, 4) It should further researchers perform data processing in detail by using existing indicators, so that significant differences in the understanding of financial management personnel on fixed assets is more knowable.

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kota Pariaman dengan Kabupaten Damasraya. 2) Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan. 3) Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Damasraya

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Damasraya yang mana Kabupaten Damasraya pemekaran tanggal 18 Desember 2003, Kota Pariaman 10 April 2002, dan Kabupaten Solok Selatan 18 Desember 2003. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dengan menyebarkannya kepada kantor dinas pengelola keuangan dan aset daerah (DPPKAD) ketiga daerah yang menjadi obyek penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis komparatif *One Way ANOVA* dengan keputusan berdasarkan signifikansi 0,05 untuk melihat perbedaan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Daerah Pemekaran di Sumatera Barat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan 1) Terdapat perbedaan

Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Dharmasraya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP aparat pengelola keuangan pemerintah daerah tentang aset tetap sebesar 15,174, 2) Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP aparat pengelola keuangan pemerintah daerah tentang aset tetap sebesar 43.58902, 3) Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP standar akuntansi pemerintah aparat pengelola keuangan pemerintah daerah sebesar -28.41471.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada pemerintah, 1) Oleh karena Standar Akuntansi Pemerintah merupakan dasar pemberian opini oleh BPK dan merupakan pedoman penting dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan maka hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pemahaman akan SAP sehingga perbedaan persepsi atas laporan keuangan dapat dihindari, 2) Hendaknya penelitian mendatang memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat memperoleh banyak sampel, 3) Penggunaan selain metode kuesioner seperti metode *interview* dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek, 4) Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan pengolahan data secara rinci dengan menggunakan indikator yang ada, sehingga perbedaan signifikan atas pemahaman aparat pengelola keuangan tentang aset tetap lebih dapat diketahui.

## 1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan terus bergulirnya reformasi, dan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban aktivitasnya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Untuk meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan pemerintah serta untuk mewujudkan dan mengaplikasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan serta realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Karena laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara relevan dan reliabel yang perlu disertai dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang mempengaruhi keputusan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah: 1) Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2) Opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 3) Opini tidak wajar (*adversed opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 4) Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak dapat untuk membuat kesimpulan serta terjadinya penyimpangan yang sangat material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Selain itu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang menjadi dasar pemberian opini audit adalah 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Dasar pemberian opini ini mengharuskan pemerintah daerah memahami dan melaksanakan keempat komponen yang menjadi acuan dalam pemberian opini tersebut dan hal ini mempertegas opini yang diberikan oleh BPK menggambarkan bagaimana pemahaman dan pelaksanaan keempat komponen acuan pemberian opini yang telah ditetapkan secara nasional.

Menurut Arens (2004:432) pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori :1) Keandalan laporan keuangan, 2) Efektivitas dan efisiensi dari operasional, 3) Pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan. Tujuan dari pengendalian intern akan tercapai jika kelima elemen pengendalian intern telah cukup dilaksanakan. Lima elemen pengendalian intern yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan. 2) Penilaian Risiko adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. 3) Aktivitas Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah

diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.4) Informasi dan Komunikasi yang bertujuan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait.5) Pengawasan adalah aktivitas penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi seperti yang diharapkan.

Dalam IHPS 2010 dijelaskan opini TMP dan TW diberikan oleh BPK sebagian besar disebabkan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar disebabkan belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan kegiatan pengendalian. Lingkungan pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI bukan menjadi kelemahan yang mengakibatkan permasalahan dalam pengendalian dan menimbulkan kasus-kasus kelemahan SPI. Hal ini menegaskan lingkungan pengendalian pada pemerintah daerah masih kurang efektif dalam pelaksanaannya sehingga memicu timbulnya kesalahan.

Luasnya suatu wilayah merupakan salah satu penyebab timbulnya daerah pemekaran, oleh karena itu daerah pemekaran yang menjadi lebih sempit ruang lingkungannya hendaknya lebih dapat meningkatkan SPI terutama lingkungan pengendalian.

Fenomena yang berkembang beberapa tahun ini pada Kabupaten Damasraya terlihat kurangnya pelaksanaan SPI dimana mantan bendahara umum Partai Demokrat, Nazaruddin menggelembungkan biaya harga tanah lokasi pembangunan rumah sakit di Damasraya Sumatera Barat dari Rp 300 juta menjadi Rp 5 miliar kemudian untuk meratakan habis Rp 19 miliar dan untuk membangunnya Rp 30 miliar. di Provinsi Sumatera Barat terjadi kelemahan lingkungan pengendalian terlihat dari komitmen terhadap kompetensi yang belum memadai, tidak didukungnya kebijakan dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, serta lemahnya pengendalian dan koordinasi tugas antara atasan dan bawahan. Kelemahan SPI lainnya yang juga

berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain pengelolaan kas belum tertib, nilai persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisasi fisik, pencatatan penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan fungsinya, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum dibuat.

Selain itu masih banyaknya Kabupaten dan Kota yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, bahkan ada daerah yang mendapatkan opini tidak memberikan pendapat, sehingga perlu dilihat bagaimana pelaksanaan SPIP terutama pada lingkungan pengendalian pada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat karena dalam pemberian opini salah satu acuan yang digunakan badan pemeriksa keuangan adalah SPIP. Berikut data Iktisar Hasil Pemeriksaan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2007-2009.

#### **Tabel I LKPD Prov. Sumatera Barat 2007-2012**

Data diatas memperlihatkan pada tahun 2007 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat tidak satupun daerah yang mendapatkan opini WTP, secara umum pemerintah daerah mendapatkan opini WDP yakni sekitar 79 % dan sisanya 21 % mendapatkan opini *Disclaimer*. Pada tahun 2008, 10.5 % daerah yang mendapatkan opini WTP yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dan hanya daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan yang mendapatkan opini *Disclaimer* dan selebihnya daerah mendapatkan opini WDP. Pada tahun 2009 opini WTP hanya diperoleh Kabupaten Tanah Datar, dan untuk predikat *Disclaimer* masih disandang oleh Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2010 tidak ada satupun yang mendapatkan opini WTP. begitu juga dengan tahun 2011, tidak ada satupun yang mendapatkan WTP. pada tahun 2012 opini WTP diraih oleh kota pariaman sedangkan selebihnya mendapatkan WDP.

Selain itu, kelemahan pelaksanaan lingkungan pengendalian terlihat dari IHPS 2010, dengan rincian sebagai berikut :

#### **Tabel II Iktisar Hasil Pemeriksaan SPIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010**

Dari data diatas terlihat hanya beberapa daerah yang mendapatkan penilaian buruk dari pelaksanaan SPIP meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu kelemahan sistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/daerah serta pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa. Kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern dalam entitas yang diperiksa. Permasalahan yang telah diuraikan diatas memperlihatkan masih kurangnya pelaksanaan SPIP dilingkungan pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, sangat terlihat kesalahan mencolok yang terdapat pada lingkungan pengendalian, dimana dengan adanya peningkatan lingkungan pengendalian kemungkinan pemerintah daerah bisa mendapatkan opini WTP, sehingga dalam hal ini perlu dilihat bagaimana tingkat pelaksanaan SPIP terutama dalam lingkungan pengendalian di kabupaten dan kota Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kota Pariaman dengan Kabupaten Damaraya?
2. Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan?
3. Perbedaan Pelaksanaan SPIP oleh DPPKAD Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Damaraya

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang SPIP khususnya lingkungan pengendalian.
2. Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi dunia akademik tentang bagaimana Pelaksanaan SPIP tentang Lingkungan Pengendalian pada Daerah Pemekaran.

3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintah khususnya SKPD yang menyusun LKPD agar menghasilkan opini pelaporan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **2. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

### **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Dalam PP No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, Pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (1992:29), "Sistem Pengendalian intern meliputi organisasi semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mengecek kecermatan dan kehandalan data akuntansi, meningkatnya efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan".

Aren (2004:397) sasaran hasil yang luas, dalam merancang suatu sistem kendali yang efektif:

1. Keandalan Pelaporan Keuangan

Manajemen bertanggungjawab atas menyiapkan laporan keuangan untuk investor,

kreditur, dan para pemakai lainnya. Manajemen mempunyai tanggung jawab baik hukum dan professional untuk yakin bahwa informasi tersebut disiapkan secara wajar menurut sistem pelaporan seperti GAAP.

## 2. Efisiensi dan Efektivitas Operasional

Kendali di dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan yang efektif dan efisien atas sumber dayanya, mencakup personil, untuk mengoptimalkan sasaran perusahaan. Bagian penting dari kendali ini adalah informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan internal.

## 3. Pemenuhan Ketentuan Hukum dan Regulasi yang Bisa diterapkan, organisasi diminta untuk mengikuti banyak hukum dan peraturan.

Dalam PP 60 No Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

### **Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern**

Aren (2004:402) lima komponen Pengendalian Internal:

#### 1. Lingkungan Kendali

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.

#### 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi manajemen dan analisis risiko yang relevan dengan persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP

#### 3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan untuk yang termasuk dalam empat komponen yang lain, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran hasil entitas.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang terkait.

#### 5. Pengawasan

Aktivitas pengawasan berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh

manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi seperti yang diharapkan.

### **Pengertian Pemekaran**

Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: *Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.* Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 da lam UU tersebut dinyatakan: *Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.*

#### Tujuan Pemekaran Wilayah

Salah satu tujuan Pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka "keterkungkungan" masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dsb.

#### Kriteria dan Persyaratan Pemekaran Wilayah

Kriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pemekaran kecamatan, kelurahan ataupun desa adalah sama, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Setiap pemekaran wilayah harus dilandasi hasil kajian, khusus untuk pemekaran daerah dan pemekaran desa harus didukung atau dikehendaki oleh masyarakat setempat

## Penelitian Relevan

Penelitian Fardila (2008), yang meneliti mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan kota Padang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang secara implisit belum mampu menerapkan SAP, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Dinas di Kota Padang yang belum selesai dalam menyusun laporan keuangan. Serta adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemko Padang.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan masih lemahnya kualitas laporan keuangan dari pemerintah, karena pemerintah belum sepenuhnya menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan.

Selain itu penelitian Siska (2009) yang meneliti mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi BPKP Provinsi Sumatera Barat), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah.

Ayomi (2008) melakukan penelitian yang menguji Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. Dalam penelitian Ayomi bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif secara statistik antara manfaat laporan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan.

## Pelaksanaan SPIP di Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Damasraya.

Dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar

laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Untuk menciptakan kualitas laporan keuangan itu diperlukan adanya pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Perlunya menerapkan SPIP dilatar belakangi oleh adanya beberapa isu pokok dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : opini disclaimer (tidak memberikan pendapat) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Opini disclaimer yang diberikan BPK itu dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara/daerah. Disamping itu penyerapan anggaran yang relatif rendah atau lambat juga menjadi isu yang tidak kalah menariknya. Bagi daerah yang penyerapan anggarannya rendah telah mendapat kecaman dari masyarakat dan untuk itu pemerintah pusat memberikan *punishment* kepada daerah-daerah yang dinilai rendah kinerja penyerapan anggarannya. Isu lainnya yang juga sangat mendapat perhatian publik adalah berkaitan dengan masalah korupsi. Dengan membangun SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya ditujukan untuk menciptakan pelaporan keuangan pemerintah yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan, serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi (*clean government*), memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dari hasil pemeriksaan terhadap LKPD tahun 2009 menunjukkan bahwa tidak/belum diperolehnya WTP BPK masih didominasi oleh sebab karena tidak/belum terpenuhinya kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, jika setiap pencatatan laporan keuangan dari setiap SKPD tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah tentunya penilaian WTP dari BPK tidak akan pernah mampu diraih. Informasi dan

penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas pengelolaan keuangan daerah akan menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan dari daerah. Pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini akan meneliti sejauh mana pemerintah daerah mengungkapkan informasi keuangannya dalam laporan keuangan seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan mencoba mencari hubungan antara karakteristik pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan.

Fenomena yang berkembang beberapa tahun ini di Provinsi Sumatera Barat Kelemahan lingkungan pengendalian terlihat dari komitmen terhadap kompetensi yang belum memadai, tidak didukungnya kebijakan dengan pedoman pelaksanaan yang jelas, serta lemahnya pengendalian dan koordinasi tugas antara atasan dan bawahan. Kelemahan SPI yang sering terjadi terutama dalam pengendalian aset tetap seperti nilai aset tetap tidak dikapitalisasi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, perbedaan pencatatan antara saldo aset tetap pada neraca dengan dokumen sumber dan penyajian aset tetap tidak didasarkan hasil inventarisasi dan penilaian. Hal-hal tersebut berpengaruh terhadap saldo aset tetap sehingga mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Kelemahan SPI lainnya yang juga berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan antara lain : pengelolaan kas belum tertib, nilai persediaan yang dilaporkan tidak berdasarkan inventarisasi fisik, pencatatan penyertaan modal pemerintah dan dana bergulir tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, realisasi belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum dibuat.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah.

Penelitian ini akan melihat perbedaan dari pelaksanaan SPIP lingkungan pengendalian pada 3 daerah yang mendapatkan hasil audit atas laporan keuangan berbeda yakni Kota Pariaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Damasraya. Berdasarkan uraian tersebut dan berlandaskan teori serta pengembangan hipotesis maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

### **Gambar 1 Kerangka Konseptual**

#### **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan?
- H2 : Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kota Pariaman dengan Kabupaten Damasraya?
- H3 : Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Damasraya?

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif(*ex post facto*), yaitu penelitian menjelaskan data yang bersifat membandingkan. Menurut Gay (1976) dalam Husein (1998:59), penelitian ini berjalan dengan cara menentukan akibat lalu menemukan sebab. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bermula dari pengamatan penelitian akibat dari sesuatu yang kemudian ditentukan penyebabnya.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan kumpulan individu atau kumpulan objek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Menurut Sekaran (124: 2006), keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi disebut dengan populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Damasraya yang

mana Kabupaten Damasraya pemekaran tanggal 18 Desember 2003, Kota Pariaman 10 April 2002, dan Kabupaten Solok Selatan 18 Desember 2003(www.goggle.com).

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative sama dan dianggap bias mewakili populasi (Sekaran, 124:2006). Secara umum, jumlah sampel yang dapat diterima untuk suatu studi tergantung dari jenis studi yang dilakukan. Untuk studi komparatif, minimal 30 subjek per grup dianjurkan. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi, sampel dan responden adalah aparat pengelola keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Damasraya dan Kota Pariaman.

Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Damasraya dan Kota Pariaman. Oleh karena jumlah anggota pegawai pengelola keuangan pemerintah daerah yang bekerja di DPKD Kabupaten Solok Selatan sedikit sebanyak 21, maka peneliti melakukan *total sampling*. Sedangkan untuk pegawai pengelola keuangan pemerintah daerah yang bekerja di DPKD Kabupaten Damasraya dan Pariaman, peneliti melakukan pengambilan sampel.

Selanjutnya, dengan tingkat toleransi ( $e$ ) adalah 5%, diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 orang untuk Kabupaten Damasraya dan 63 orang untuk Kota Pariaman, dengan perhitungan sebagai berikut :

### **Tabel 3 Rangkuman Responden Aparat Pengelola Keuangan Pemerintah daerah**

#### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka. (Muhammad:2008:99). Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Sehingga, data kualitatif harus dikonversi kedalam data kuantitatif.

#### **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan digali dari sumber utama (sumber asli), baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif . Data untuk penelitian ini

adalah data yang langsung diperoleh dari sumber aslinya dan tidak melalui perantaran tertentu. Data tersebut diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui metode kuesioner yang berupa pernyataan yang jawabannya telah ditentukan kepada responden. Kuisisioner disebarkan kepada setiap responden yang disertai dengan surat permohonan untuk mengisi kuisisioner. Untuk memastikan apakah responden telah mengisi kuisisioner, maka maksimal setelah satu minggu kuisisioner dikirimkan, peneliti mendatangi instansi tempat responden bekerja untuk memeriksa apakah kuisisioner telah diisi secara langsung.

#### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa satu variabel, yaitu variable Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang dilihat pada daerah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Damasraya, dan Kota Pariaman.

#### **Pengukuran Variabel**

Untuk mengukur perbedaan pelaksanaan sistem pengendalian intern oleh Aparat Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah, yang dilihat pada daerah Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Damasraya, dan Kota Pariaman, peneliti menggunakan metode penskalaan likert. Skala ini digunakan untuk mengukur respon subjek ke dalam lima poin skala dengan interval yang sama, yaitu Sangat Tidak Sesuai(STS), Tidak Sesuai (TS), Tidak Tahu (TT), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Namun, peneliti tidak menggunakan skala TidakTahu (TT) untuk menghindari jawaban yang memberikan keraguan atau tidak pasti.

#### **Tabel 4 . Skala Pengukuran Variabel**

#### **Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuisisioner sebagai instrument penelitian. Indikator yang digunakan dalam instrument penelitian ini berasal dari Standar Akuntansi Pemerintah. Gambaran pernyataan di dalam kuisisioner yang

digunakan untuk mengumpulkan data terlihat dalam table berikut ini :

### Tabel.5 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

#### Uji Instrumen

Sebelum data yang dikumpulkan melalui kuesioner diolah, maka data tersebut harus melalui uji kualitas data yang dilakukan melalui uji validitas (*validity*), reliabilitas (*reliability*), dan normalitas (*normality*).

##### 1. Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Untuk itu diperlukan sebuah pengujian guna menjamin bahwa data yang diperoleh adalah valid atau akurat. *Validity Test* adalah pengujian yang dilakukan terhadap instrumen penelitian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa instrumen pengumpul data (kuesioner) tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005:45). Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung (*Corrected Item Total Correlation*) dengan *r* table untuk mengetahui valid tidaknya suatu data. Pengujian validitas ini memiliki kriteria :

- Jika  $r$  positif atau  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir pertanyaan valid.
- Jika  $r$  negatif atau  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir pertanyaan tidak valid.

##### 2. Uji Reliabilitas

Konsep dasar reliabilitas adalah konsistensi. *Reliability Test* adalah pengujian terhadap alat atau instrument pengumpulan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa instrument tersebut akan memberikan hasil yang sama bila digunakan untuk beberapa kali menguji objek yang sama. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Kriteria pengukuran reliabilitas suatu variable yaitu:

- Kurang dari 0,6 : tidak reliabel
- 0,6-0,7 : dapat diterima
- 0,7-0,8 : baik

- Besardari 0,8 : reliable

#### Teknik Analisis Data

##### 1. Analisis Deskriptif

Verifikasi data

Data kuisisioner yang telah diisi oleh responden diperiksa kembali untuk memastikan bahwa semua pertanyaan sudah dijawab secara lengkap oleh responden.

Nilai persentase dimasukkan kedalam kriteria :

- Interval jawaban responden 76%-100%, maka kategori jawaban adalah baik.
- Interval jawaban responden 56%-75%, maka kategori jawaban adalah cukup baik.
- Interval jawaban responden  $<$ 56%, maka kategori jawaban adalah kurang baik.

#### Uji Hipotesis

Oleh karena penelitian ini tergolong analisis komparatif satu variabel independen dengan lebih dari dua kelompok rata-rata, yang terdiri dari Kota Dhamasraya, Kota Pariaman, dan Kabupaten Solok Selatan, maka alat uji yang digunakan adalah uji beda *One Way ANOVA* (*analysis of variance*) dengan pengolahan melalui SPSS. Asumsi ANOVA adalah populasi yang diuji berdistribusi normal, varians dari populasi sama, dan sampel tidak berhubungan satu sama lain.

Apabila *F* hitung lebih besar dari pada *F* tabel, maka secara bersama-sama terdapat perbedaan. Sedangkan kesimpulan dan keputusan diambil untuk hipotesis yang diajukan apabila:

- Signifikansi  $<$  0.05, maka  $H_a$  diterima
- Signifikansi  $>$  0.05, maka  $H_a$  ditolak.

Dalam melihat tabel *post hoc*, besarnya tingkat perbedaan terlihat pada tabel mean difference, apabila hasil bertanda positif, maka objek yang dijadikan pembandingan memiliki nilai yang lebih rendah, dan apabila hasil bernilai negatif, maka objek yang dibandingkan bernilai lebih rendah dari obojek pembandingan.

Untuk melihat tabel *anova*, *between groups* merupakan variabel independen yang dijadikan sebagai unsur pembandingan, sedangkan yang menjadi komponen *within groups* merupakan variabel dependen yang dijadikan perbandingan.

## Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Unsur dari sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
2. Lingkungan pengendalian merupakan hal dasar (pondasi) bagi komponen yang lain karena terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap dari manajemen puncak, para direktur, dan pemilik dari suatu entitas mengenai pengendalian internal dan arti penting bagi entitas yang bersangkutan.
3. Penilaian risiko adalah penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam yang telah diidentifikasi agar dampak yang nantinya akan timbul menjadi lebih sedikit.
4. Kegiatan pengendalian adalah Reviu yang dilakukan pimpinan instansi atas kinerja instansi pemerintah dan Pembinaan sumber daya manusia di instansi tersebut.
5. Informasi dan Komunikasi Informasi adalah Informasi yang disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya
6. Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan system pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.
7. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah.

## 4. TEMUAN DAN BAHASAN

### Uji Instrumen

#### 1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari data, dilihat dari *Corrected item–Total Colleration*, apabila melebihi nilai  $r$  tabel maka data dikatakan valid. Didapat  $r$  tabel untuk  $N=95$  adalah 0,250. Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan (lihat Lampiran 4), dapat dikatakan bahwa instrumen pertanyaan valid, karena  $r$  hitung  $> r$  tabel.

#### 2. Uji Reliabilitas

Untuk menentukan reliabilitas instrumen, digunakan ketetapan *alpha cronbach*  $> 0,6$  dianggap reliabel. Dari hasil pengujian reliabilitas (lihat Lampiran 4), diperoleh bahwa instrumen pertanyaan reliabel dengan tingkat reliabilitas terkecil yaitu sebesar 0,951.

#### 3. Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual data dari pengolahan SPSS 16.0 dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai  $\alpha > 0,05$ . Hasil uji normalitas dengan K-S menunjukkan sebagai berikut:

#### Tabel 6 Uji Normalitas Data

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata (*mean*) dari 95 sampel sebesar 119,83 dan standar deviasi 22,246, *absolute D* adalah 0,139 dengan  $z$  *kolmogorof smirnov* 1,351, ini memberikan nilai signifikansi 0,52 yang diatas nilai 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, dengan demikian dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

### Deskriptif Penelitian

Berdasarkan *descriptives* hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa; 1) Rata-rata pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan jumlah responden 41 orang adalah 134,44, standar deviasi 10,76 dan tingkat kesalahan (*standard error*) 1,680. 2) Rata-rata Pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasrayadengan jumlah responden 34 orang adalah 119,27, standar deviasi

13,81 dan tingkat kesalahan (*standard error*) 2,368  
3) Rata-rata pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dengan jumlah data responden 20 orang adalah 90,85, standar deviasi 22,98 dan tingkat kesalahan (*standard error*) 5,138.

Dapat disimpulkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memiliki pemahaman yang baik terhadap standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap, hal ini terlihat dari rata-rata pemahaman aparat pengelola keuangan Kota Pariaman lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok Selatan tentang aset tetap. Pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya juga lebih besar dibandingkan Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya lebih besar dibandingkan Kabupaten Solok Selatan. Tabel 7 diatas juga menjelaskan, rata-rata keseluruhan pemahaman aparat pengelola keuangan pada tiga daerah tersebut tentang aset tetap sebesar 64,89.

## Uji Hipotesis

### 1. Uji ANOVA

Tabel 17 menunjukkan hasil uji perbedaan pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok Selatan secara bersama-sama terhadap standar akuntansi pemerintah tentang aset. Dari uji ANOVA pada Tabel 17 diperoleh F hitung 56,088 dan F tabel<sub>(59,2)</sub>3,180 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok Selatan.

### Tabel 18 Hasil uji F atau ANOVA

### 2. Post hoc tests

Post hoc test berfungsi untuk mencari kelompok populasi mana yang berbeda dan kelompok populasi mana yang tidak berbeda. Ada dua macam alat uji yaitu Tukey test dan

bonferroni test. Dalam penelitian ini, post hoc test yang digunakan adalah bonferroni test, dikatakan berbeda apabila nilai signifikan  $< 0,05$  dan pada kolom "*mean difference*" bertanda '\*'.

### Tabel 19 Hasil uji post hoc test Multiple Comparisons

Dari tabel post hoc test dapat dianalisis, bahwa:

- Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Dhamasraya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP aparat pengelola keuangan pemerintah daerah tentang aset tetap sebesar 15,174 dimana tanda positif menunjukkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih Pelaksanaan SPIP dari aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya. Dengan demikian hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima.
- Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP aparat pengelola keuangan pemerintah daerah tentang aset tetap sebesar 43.58902 dimana tanda positif menunjukkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih melaksanakan SPIP dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan. Dengan demikian hipotesis 2 ( $H_2$ ) diterima.
- Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya dengan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP standar akuntansi pemerintah aparat pengelola keuangan pemerintah daerah sebesar - 28.41471 dimana tanda positif menunjukkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya lebih melaksanakan SPIP dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan. Dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) diterima.

- d. Dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok Selatan, aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih melaksanakan SPIP.

#### **Pembahasan.**

##### **1. Perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan Pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Dhamasraya. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Perbedaan Pelaksanaan SPIP aparat pengelola keuangan pemerintah daerah tentang aset tetap sebesar 15,174 dimana tanda positif menunjukkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih Pelaksanaan SPIP dari aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyebutkan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang menjadi dasar pemberian opini audit adalah 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, hal ini menegaskan bahwasanya hasil tanda audit atas laporan keuangan yang berbeda pada setiap daerah memperlihatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berbeda pula pada daerah tersebut karena salah satu dasar yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah standar akuntansi pemerintah dan standar tersebut telah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Jika kita lihat hasil audit Kota Pariaman dan Kabupaten Dhamasraya terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan juga terdapat pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan pemerintah daerah pada Kota Pariaman dan Kabupaten Dhamasraya.

Berdasarkan data mentah, hasil penelitian ini sesuai dengan data mentah yang diolah, dimana terdapat perbedaan pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Dhamasraya pada setiap indikator penelitian.

##### **2. Perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kota Pariaman dengan Kabupaten Dhamasraya**

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 diperoleh terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintah aparat pengelola keuangan daerah tentang aset tetap antara Kota Padang dengan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan perbedaan sebesar 9,524 dalam hal ini Kota Padang lebih memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dibandingkan Kabupaten Solok Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan FDASP (2006), dimana alasan mendasari diperlukannya pemahaman akan standar akuntansi pemerintah adalah guna menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan serta pemeriksa laporan keuangan. Karena jika kita lihat hasil opini audit BPK atas laporan keuangan, Kota Padang dari tahun 2007-2009 memperoleh opini WDP sedangkan Kabupaten Solok Selatan memperoleh opini TMP dari tahun 2007-2009. Hal ini menjelaskan, standar akuntansi pemerintah yang bertujuan menghindari terjadinya perbedaan persepsi atas laporan keuangan, tidak terlalu baik dipahami oleh aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyebutkan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang menjadi dasar pemberian opini audit adalah 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosures), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian

Intern, hal ini menegaskan bahwasanya hasil tanda audit atas laporan keuangan yang berbeda pada setiap daerah memperlihatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berbeda pula pada daerah tersebut karena salah satu dasar yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah standar akuntansi pemerintah dan standar tersebut telah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Jika kita lihat hasil audit Kota Padang dan Kabupaten Solok Selatan terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan juga terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap oleh aparat pengelola keuangan pemerintah daerah pada Kota Padang dengan Kabupaten Solok Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2008) yang berjudul peranan pemahaman aparatur atas PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemahaman akan standar akuntansi pemerintah memiliki peran yang signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan instansi daerah di kabupaten majelangka dengan kontribusi 45,29 % terhadap laporan keuangan, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan kualitas laporan keuangan Kota Padang dilihat dari opini BPK yang kurang baik menandakan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan tidak begitu memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dan kualitas laporan keuangan Kota Padang dilihat dari opini BPK yang cukup baik menandakan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang memiliki pemahaman yang lebih baik akan standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dibandingkan Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan data mentah, hasil penelitian ini sesuai dengan data mentah yang diolah, dimana terdapat perbedaan pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang dengan Kabupaten Solok Selatan pada setiap indikator penelitian. Pada indikator pengakuan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota

Padang lebih memahami pengakuan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 6,85% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 2 sebesar 39,15%. Pada indikator klasifikasi terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang lebih memahami pengklasifikasian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 7,74% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 4 sebesar 10,71%.

Pada indikator penilaian terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang juga lebih memahami penilaian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 15,08% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 5 sebesar 35,12%. Untuk indikator penyajian terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang lebih memahami penyajian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 14,68% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 10 sebesar 23,21%.

Pada indikator pengukuran terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang juga lebih memahami pengukuran aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 13,24% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 11 sebesar 17,86%. Untuk indikator penyusutan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang lebih memahami penyusutan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 11,01% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 16 sebesar 12,05%.

Pada indikator penghentian dan pelepasan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang juga lebih memahami penilaian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan

sebesar 23,21% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 18 sebesar 40,48%. Untuk indikator pengungkapan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang lebih memahami pengungkapan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 4,17% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 20 sebesar 8,93%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Padang lebih memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

### **3. Perbedaan pelaksanaan SPIP oleh aparat pengelola keuangan daerah di Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Damasraya**

Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 diperoleh Terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintah aparat pengelola keuangan daerah tentang aset tetap antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan perbedaan sebesar 21,656 dimana Kota Pariaman lebih memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dibandingkan Kabupaten Solok Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan FDASP (2006), dimana alasan mendasari diperlukannya pemahaman akan standar akuntansi pemerintah adalah guna menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan serta memeriksa laporan keuangan. Karena jika kita lihat hasil opini audit BPK atas laporan keuangan, Kabupaten Solok Selatan dari tahun 2007-2009 memperoleh opini TMP sedangkan Kota Pariaman pernah memperoleh opini WTP. Hal ini menjelaskan, standar akuntansi pemerintah yang bertujuan menghindari terjadinya perbedaan persepsi atas laporan keuangan, tidak terlalu baik dipahami oleh aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota

Pariaman sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyebutkan dalam pemeriksaan laporan keuangan yang menjadi dasar pemberian opini audit adalah 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 2) Kecukupan Pengungkapan (*adequate disclosures*), 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, hal ini menegaskan bahwasanya hasil tanda audit atas laporan keuangan yang berbeda pada setiap daerah memperlihatkan pemahaman standar akuntansi pemerintah yang berbeda pula pada daerah tersebut karena salah satu dasar yang digunakan dalam pemeriksaan laporan keuangan adalah standar akuntansi pemerintah dan standar tersebut telah menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Jika kita lihat hasil audit Kabupaten Solok Selatan dan Kota Pariaman terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan juga terdapat perbedaan pemahaman standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap oleh aparat pengelola keuangan pemerintah daerah pada Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2008) yang berjudul peranan pemahaman aparatur atas PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas penyajian laporan keuangan instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pemahaman akan standar akuntansi pemerintah memiliki peran yang signifikan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan instansi daerah di kabupaten majelangka dengan kontribusi 45,29 % terhadap laporan keuangan, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat disimpulkan kualitas laporan keuangan Kabupaten Solok Selatan dilihat dari opini BPK yang kurang baik menandakan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan kurang memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dan kualitas laporan keuangan Kota Pariaman dilihat dari opini BPK yang sangat baik

menandakan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman memahami dengan baik standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap.

Berdasarkan data mentah, hasil penelitian ini sesuai dengan data mentah yang diolah, dimana terdapat perbedaan pemahaman aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Kota Pariaman pada setiap indikator penelitian. Pada indikator pengakuan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami pengakuan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 31,58% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 2 sebesar 51,65%. Pada indikator klasifikasi terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami pengklasifikasian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 33,20% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 4 sebesar 23,94%.

Pada indikator penilaian terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman juga lebih memahami penilaian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 29,32% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 5 sebesar 56,15%. Untuk indikator penyajian terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami penyajian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 31,04% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 10 sebesar 53,37%.

Pada indikator pengukuran terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman juga lebih memahami pengukuran aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 23,30% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 14 sebesar 50,73%. Untuk indikator

penyusutan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami penyusutan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 20,80% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 16 sebesar 21,23%.

Pada indikator penghentian dan pelepasan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman juga lebih memahami penilaian aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 30,19% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 18 sebesar 51,59%. Untuk indikator pengungkapan terlihat aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami pengungkapan aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan yang terlihat dari rata-rata perbedaan sebesar 17,79% dan perbedaan yang signifikan terdapat pada item pernyataan 20 sebesar 24,01%.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih memahami standar akuntansi pemerintah tentang aset tetap dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

## **5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN**

### **Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah:

- a. Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Dhamasraya. Dengan demikian hipotesis 1 ( $H_1$ ) diterima.
- b. Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman dengan Kabupaten Solok. Dengan demikian hipotesis 2 ( $H_2$ ) diterima.

- c. Terdapat perbedaan pelaksanaan SPIP antara aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dhamasraya dengan Kabupaten Solok Selatan. Dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) diterima.
- d. Dibandingkan aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Solok Selatan, aparat pengelola keuangan pemerintah daerah Kota Pariaman lebih melaksanakan SPIP.

### Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Oleh karena terbatasnya responden mengakibatkan jumlah data pergrup responden yang diperoleh terbatas;
2. Sedikitnya kuisisioner yang dapat diolah sehingga mengakibatkan hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua daerah.
3. Dikarenakan pengolahan data dilakukan secara umum, maka hasil yang diperoleh tidak menggambarkan secara rinci indikator yang lebih memiliki perbedaan signifikan atas pemahaman aparat pengelola keuangan tentang aset tetap.

### Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Oleh karena Standar Akuntansi Pemerintah merupakan dasar pemberian opini oleh BPK dan merupakan pedoman penting dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan maka hendaknya pemerintah lebih meningkatkan pemahaman akan SAP sehingga perbedaan persepsi atas laporan keuangan dapat dihindari
2. Hendaknya penelitian mendatang memperluas wilayah penelitian, sehingga dapat memperoleh banyak sampel;
3. Penggunaan selain metode kuesioner seperti metode *interview* dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subyek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek.

4. Hendaknya peneliti selanjutnya melakukan pengolahan data secara rinci dengan menggunakan indikator yang ada, sehingga perbedaan signifikan atas pemahaman aparat pengelola keuangan tentang aset tetap lebih dapat diketahui.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. 2004. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Sebelas. Jakarta: PT Indeks IKAPI
- \_\_\_\_\_, 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Keduabelas. Jakarta: PT Indeks IKAPI
- Ayomi, Rindang Sri. 2008. Analisis Manfaat Laporan Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan. *Thesis* Bandung: FE-UGM
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darman, Siska. 2009. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi: BPKP Provinsi Sumatera Barat). *Skripsi*. Padang. FE UNP
- Guy et al. 2002. *Auditing Jilid 1*. 5th edition. Erlangga. Jakarta. Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2005. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". Universitas Diponegoro. Semarang. Indonesia.
- Munawir.1995.*Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta:Liberty.

- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [07/01/2009]
- Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [07/01/2009]
- \_\_\_\_\_, Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [07/01/2009]
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [15/11/2009]
- \_\_\_\_\_, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [07/01/2009]
- \_\_\_\_\_, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui ([www.google.com](http://www.google.com)) [07/01/2009]
- Rachmat, Sanyoto. 2006. Analisis kondisi lingkungan Pengendalian (Control Environment) Dalam Sistem Pengendalian Intern Bank BTN. *Thesis* Semarang:FE UNDIP
- Umar, Husein. 1998. *Riset Akuntansi*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

## KUESIONER

### IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan Bapak/Ibu Mengisi daftar berikut :

1. Nama : \_\_\_\_\_ (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Umur : \_\_\_\_\_ Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMA  D3  S1  S2  S3
5. Lama Bapak/Ibu menduduki jabatan ini :  1-5 th  5-10 th  >10 th
6. latar Belakang Pendidikan:  Akuntansi  Manajemen  Ekonomi  
 Hukum  Pertanian  MIPA  
 Lain-lain (.....)

### PETUNJUK PENGISIAN

Bapak / Ibu dimohon untuk menjawab pernyataan-pernyataan dibawah ini, dengan cara memberikan tanda (v) pada salah satu ketentuan dibawah ini untuk menyatakan persepsinya.

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| SL : Selalu | JR : Jarang       |
| SR : Sering | TP : Tidak Pernah |
| K : Kurang  |                   |

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No	Pernyataan	SL	SR	K	JR	TP
1	Pimpinan instansi memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat instansi Pemerintah					
2	Adanya tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku					
3	Pada instansi ini adanya pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya					
4	Pimpinan Instansi Pemerintah yang dipilih memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah					
5	Pemimpin instansi berupaya melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah					
6	Struktur organisasi disusun berpedoman pada kepentingan individu.					
7	Adanya evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis					
8	Pemberian wewenang kepada pegawai didasarkan atas tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah					
9	Adanya penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai					

10.	Pada instansi ini, kegiatan yang dianggarkan tidak sepenuhnya terlaksanakan.					
11	Pengawasan intern pemerintah selalu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah					
12	Instansi ini selalu melakukan mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait guna mencapai hasil yang lebih baik					

## B. Penilaian Resiko

No	Pernyataan	SL	SR	K	JR	TP
1	Instansi ini menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal					
2	Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima					
3	Instansi ini selalu melakukan analisis resiko untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah					
4	Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan proses formal dan informal untuk menganalisis risiko berdasarkan kegiatan sehari-hari					
5	Kriteria klasifikasi risiko rendah, menengah atau tinggi sudah ditetapkan					

## C. Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan	SL	SR	K	JR	TP
1	Adanya reuiu atas pencapaian kinerja yang dilakukan secara periodik					
2	Pencapaian kinerja pemerintah didasarkan pada indikator-indikator yang telah ditetapkan					
3	Adanya strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi					
4	Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi					
5	Adanya pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dalam pengamanan sistem informasi; pengendalian atas akses; dan pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi					
6	Pimpinan Instansi Pemerintah telah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai tentang rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik					
7	Pada instansi kurang terdapat pemisahan tugas dan wewenang yang jelas					
8	Adanya aturan yang tegas dalam Otorisasi dan pelimpihan wewenang pada instansi ini untuk pencapaian tujuan organisasi					

9	Instansi ini telah mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat					
10	Adanya pengelompokan dokumentasi yang terpisah mengenai kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam instansi ini					
11	Adanya implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan					

#### D. Informasi dan Komunikasi

No	Pernyataan	SL	SR	K	JR	TP
1	Adanya penyampaian Informasi dari sumber internal dan eksternal yang didapat kepada pimpinan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari pelaporan Instansi Pemerintah					
2	Pimpinan Instansi Pemerintah sudah menerima informasi hasil analisis yang dapat membantu dalam mengidentifikasi tindakan khusus yang perlu dilaksanakan					
3	Informasi keuangan dan anggaran yang memadai sudah disediakan guna mendukung penyusunan pelaporan keuangan internal dan eksternal					
4	Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi berkembangnya kebutuhan informasi.					
5	Pimpinan Instansi Pemerintah secara terus menerus memantau mutu informasi yang dikelola, diukur dari segi kelayakan isi, ketepatan waktu, keakuratan, dan kemudahan aksesnya					

#### E. Pemantauan Pengendalian Intern

No	Pernyataan	SL	SR	K	JR	TP
1	Adanya pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas					
2	Adanya evaluasi terpisah yang diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern					
3	Adanya evaluasi terpisah yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah					

*Terima Kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini*

## LAMPIRAN

**Tabel I**  
**LKPD Prov. Sumatera Barat 2007- 2012**

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun 2007	Opini Tahun 2008	Opini Tahun 2009	Opini Tahun 2010	Opini Tahun 2011	Opini Tahun 2012
1	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
2	Kab. Kepulauan Mentawai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Pasaman Barat	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP
5	Kota Pariaman	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

**Tabel II**

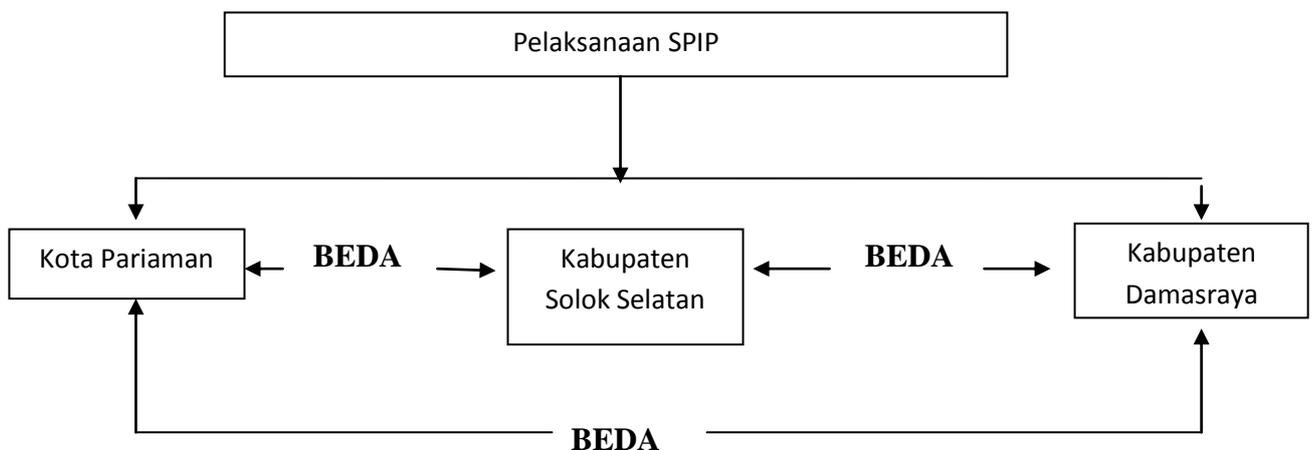
**Iktisar Hasil Pemeriksaan SPIP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010**

No	Entitas	Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
			Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern
			Jml Kasus	Jml Kasus	Jml Kasus
1	Provinsi Sumatera Barat	52	24	25	3
2	Kab.Kep.Mentawai	5	1	3	1
3	Kab.Lima Puluh Kota	11	3	8	-
4	Kab.Pasaman Barat	13	8	5	-
5	Kab.Solok Selatan	23	12	9	2

Sumber : [www.goggle.com](http://www.goggle.com)

## KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar



**Tabel 3****Rangkuman Responden Aparat Pengelola Keuangan Pemerintah daerah**

No	Kota/Kab.	Responden
1	Kabupaten Solok Selatan	21
2	Kabupaten Damasraya	36
3	Kota Pariaman	63
Jumlah		120

**Tabel 4****Skala Pengukuran Variabel**

Pernyataan	Jawaban	
	Positif	Negatif
Sangat Tidak Sesuai	1	4
Tidak Sesuai	2	3
Sesuai	3	2
Sangat Sesuai	4	1

**Tabel 5**

No	Variabel	Indikator	No	Sumber
1	Lingkungan pengendalian.	1. Integritas dan nilai etika 2. Komitmen terhadap kompetensi 3. Kepemimpinan yang kondusif 4. struktur organisasi yang sesuai 5. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab 6. penerapan kebijakan 7. peran aparat pengawasan intern pemerintah 8. Hubungan kerja dengan instansi pemerintah lain	1,2 3,4 5 6,7 8 9,10 11 12	PP No 60 Tahun 2008
2	Penilaian Resiko	1. Identifikasi Resiko 2. Analisis Resiko	13,14 15,16,17	PP No 60 Tahun 2008
3	Kegiatan Pengendalian	a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; b. Pembinaan sumber daya manusia; c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. Pengendalain fisik atas aset; e. Pemisahan fungsi; f. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas tarnsaksi dan kejadian; g. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting; h. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.	18,19 20 21,22 23 24 25 26,27 28	PP No 60 Tahun 2008

4	Informasi dan Komunikasi	i. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;	29,30,31	PP No 60 Tahun 2008
		j. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.	32,33	
5	Pemantauan	a. on-going monitoring activities, b. a separate monitoring activities	34 35,36	PP No 60 Tahun 2008

**Tabel 6**

1. Uji Normalitas Residual  
NPar Tests

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		K
N		95
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	119.8316
	Std. Deviation	22.24604
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.139
	Negative	-.109
Kolmogorov-Smirnov Z		1.351
Asymp. Sig. (2-tailed)		.052

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. TCR Total

Item	Pariaman(a)	Damasraya(b)	Solok Selatan (c)	a vs b	a vs c	b vs c
1	95.12	85.29	70	9.83	25.12	15.29
2	94.51	74.26	57.5	20.25	37.01	16.76
3	85.98	71.32	56.25	14.65	29.73	15.07
4	93.29	83.82	63.75	9.47	29.54	20.07
5	95.12	80.15	60	14.97	35.12	20.15
6	93.29	80.88	66.25	12.41	27.04	14.63
7	93.90	83.09	63.75	10.81	30.15	19.34
8	93.29	86.03	65	7.26	28.29	21.03
9	90.85	84.56	73.75	6.29	17.10	10.81
10	93.29	75.74	57.5	17.56	35.79	18.24
11	93.29	82.35	61.25	10.94	32.04	21.10
12	95.12	90.44	67.5	4.68	27.62	22.94
13	91.46	86.03	66.25	5.43	25.21	19.78
14	95.12	88.24	58.75	6.89	36.37	29.49
15	94.51	81.62	62.5	12.89	32.01	19.12
16	90.85	73.53	67.5	17.32	23.35	6.03
17	94.51	74.26	66.25	20.25	28.26	8.01
18	90.24	82.35	62.5	7.89	27.74	19.85
19	93.90	82.35	53.75	11.55	40.15	28.60

20	94.51	80.88	52.5	13.63	42.01	28.38
21	93.29	85.29	76.25	8.00	17.04	9.04
22	92.07	86.03	62.5	6.04	29.57	23.53
23	94.51	88.97	62.5	5.54	32.01	26.47
24	93.29	77.21	61.25	16.09	32.04	15.96
25	90.24	81.62	62.5	8.63	27.74	19.12
26	93.29	87.50	77.5	5.79	15.79	10.00
27	95.73	86.03	51.25	9.70	44.48	34.78
28	94.51	86.03	62.5	8.48	32.01	23.53
29	93.90	83.09	61.25	10.81	32.65	21.84
30	93.29	85.29	62.5	8.00	30.79	22.79
31	91.46	80.88	50	10.58	41.46	30.88
32	93.29	81.62	80	11.68	13.29	1.62
33	93.29	84.56	78.75	8.73	14.54	5.81
34	96.95	88.24	56.25	8.72	40.70	31.99
35	96.95	86.76	52.5	10.19	44.45	34.26
36	92.68	85.29	61.25	7.39	31.43	24.04
Total	3360.98	2981.62	2271.25	379.36	1089.73	710.37
Rerata	93.36	82.82	63.09	10.54	30.27	19.73

### 3. Uji Hipotesis

#### Descriptives

K

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	41	134.4390	10.76115	1.68061	131.0424	137.8357	108.00	144.00
2.00	34	119.2647	13.81108	2.36858	114.4458	124.0836	98.00	143.00
3.00	20	90.8500	22.98117	5.13875	80.0945	101.6055	55.00	131.00
Total	95	119.8316	22.24604	2.28240	115.2998	124.3633	55.00	144.00

#### ANOVA

K

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	25558.040	2	12779.020	56.088	.000
Within Groups	20961.265	92	227.840		
Total	46519.305	94			

### Multiple Comparisons

K  
Bonferroni

(I) SPIP	(J) SPIP	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	15.17432	3.50118	.000	6.6366	23.7121
	3.00	43.58902	4.11692	.000	33.5497	53.6283
2.00	1.00	-15.17432	3.50118	.000	-23.7121	-6.6366
	3.00	28.41471	4.25361	.000	18.0421	38.7873
3.00	1.00	-43.58902	4.11692	.000	-53.6283	-33.5497
	2.00	-28.41471	4.25361	.000	-38.7873	-18.0421

\*. The mean difference is significant at the 0.05 level.